

PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMBANGUNAN ALTERNATIF: STUDI KRITIS TERHADAP PARADIGMA MODERNISASI PADA MASYARAKAT ADAT BADUY DI KABUPATEN LEBAK

Yudho Wiro Usodho, Hendi irawan

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial,
Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available online Juli 2026

Email:

yudhowiro12@gmail.com

hendiirawankesos@gmail.com

Abstrak

Paradigma pembangunan yang dominan sejak pertengahan abad kedua puluh sebagian besar bertumpu pada teori modernisasi, yang mengukur kemajuan dari sejauh mana suatu masyarakat bertransformasi dari kondisi tradisional menuju kondisi modern yang berorientasi industri dan pasar. Artikel ini mengkaji secara kritis relevansi paradigma tersebut dalam menjelaskan dinamika pembangunan pada masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebuah komunitas yang bertahan lintas generasi melalui sistem zonasi wilayah adat dan kepatuhan ketat terhadap pikukuh atau hukum adat leluhur. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi pustaka dan pendekatan sosiologis, artikel ini membandingkan daya jelas teori modernisasi, teori ketergantungan, teori sistem dunia, dan teori pembangunan alternatif dalam membaca kasus Baduy. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori modernisasi gagal menjelaskan ketahanan kearifan lokal Baduy karena mengasumsikan perubahan sosial berlangsung linear dan memperlakukan tradisi sebagai hambatan yang homogen terhadap kemajuan. Teori ketergantungan dan teori sistem dunia berguna untuk memetakan posisi struktural Baduy dalam relasi kekuasaan negara dan pasar yang lebih luas, terutama tekanan modernisasi tidak langsung yang dialami Baduy Luar melalui pariwisata dan pembangunan infrastruktur regional, namun kurang memberi ruang pada agensi lokal. Teori pembangunan alternatif menawarkan daya jelas paling kuat karena menempatkan masyarakat Baduy sebagai subjek aktif yang mengelola institusi keberlanjutannya sendiri, bukan objek pasif dari intervensi eksternal. Posisi negara terhadap Baduy terbukti bersifat ambivalen, yaitu melindungi kawasan inti adat sekaligus mendorong pembangunan di wilayah sekitarnya yang menimbulkan tekanan kultural secara tidak langsung. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, dengan melibatkan lembaga adat dalam perencanaan wilayah serta menjaga otonomi budaya lokal di tengah tantangan pembangunan daerah.

Kata kunci: kearifan lokal, pembangunan alternatif, teori modernisasi, masyarakat adat Baduy, relasi negara dan kekuasaan.

Abstract

The dominant development paradigm since the mid-twentieth century has largely rested on modernization theory, which measures progress by the degree to which a society transforms from a traditional condition toward an industrial, market-oriented modern state. This article critically examines the relevance of that paradigm in explaining the development dynamics of the Baduy indigenous community in Kanekes Village, Leuwidamar Subdistrict, Lebak Regency, Banten Province, a community that has sustained itself for generations through a customary land-zoning system and strict adherence to ancestral rules known as pikukuh. Using a qualitative literature study with a sociological approach, this article compares the explanatory power of modernization theory, dependency theory, world-system theory, and alternative development theory in reading the Baduy case. The findings show that modernization theory fails to account for the resilience of Baduy's local wisdom because it assumes linear social change and treats tradition as a homogeneous obstacle to progress. Dependency and world-system theory are useful for mapping Baduy's structural position within broader state and market power relations, particularly the indirect modernization pressure experienced by the Outer Baduy through tourism and regional infrastructure development, yet they underestimate local agency. Alternative development theory offers the strongest explanatory power, since it positions the Baduy community as an active subject that manages its own sustainable institutions rather than a passive object of external intervention. The state's position toward Baduy is shown to be ambivalent: protective of the customary core area while simultaneously promoting



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

development in surrounding regions that generates indirect cultural pressure. This study recommends a more participatory development policy that involves customary institutions in regional planning and safeguards local cultural autonomy amid the challenges of regional development.

Keywords: *local wisdom, alternative development, modernization theory, Baduy indigenous community, state and power relations.*

PENDAHULUAN

Pembangunan sering dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas publik. Namun, dalam kajian sosiologi pembangunan, pembangunan tidak semata dipandang sebagai proses perubahan fisik suatu wilayah, tetapi juga sebagai proses yang membawa perubahan pada tatanan sosial, sistem nilai, dan identitas budaya masyarakat yang mengalaminya. Paradigma pembangunan yang paling berpengaruh sejak pertengahan abad kedua puluh adalah teori modernisasi, yang salah satu formulasinya dikemukakan oleh Rostow (1960) melalui gagasan tahapan pertumbuhan ekonomi yang bersifat linear. Indonesia turut mengadopsi paradigma tersebut, terutama sejak era Orde Baru, melalui kebijakan pembangunanisme yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi sebagai tolok ukur utama kemajuan bangsa.

Pendekatan pembangunan yang bersifat top down dan seragam tersebut kerap mengabaikan eksistensi sistem pengetahuan dan tata kelola lokal yang telah lama berkembang pada masyarakat adat. Salah satu contoh paling menonjol adalah masyarakat adat Baduy yang bermukim di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Data etnografis menunjukkan bahwa masyarakat Baduy secara konsisten mempertahankan sistem zonasi wilayah adat, yaitu zona reuma sebagai kawasan permukiman, zona heuma sebagai ladang garapan, dan zona leuweung kolot sebagai hutan tua yang dilarang untuk dieksploitasi, sebagai basis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Suparmini, Setyawati, & Sumunar, 2013). Sistem ini bertahan lintas generasi tanpa mengikuti jalur modernisasi konvensional, seperti elektrifikasi, kendaraan bermotor, maupun pendidikan formal, karena diatur secara ketat oleh pikukuh atau hukum adat.

Temuan empiris memperkuat gambaran tersebut. Penelitian Jasmine, Saharuddin, Murdianto, dan Abdulkadir (2023) membuktikan bahwa perilaku adat masyarakat Baduy terhadap kearifan lokalnya berpengaruh signifikan terhadap pola pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka, sebuah indikasi bahwa model pembangunan berbasis nilai lokal dapat berjalan efektif tanpa bertumpu pada logika pertumbuhan ekonomi ala modernisasi. Di sisi lain, penelitian Aprianti, Indriyanti, Lestari, dan Fatihah (2024) mencatat mulai terjadinya perubahan sosial pada kelompok Baduy Luar akibat tekanan arus modernisasi di sekitarnya, seperti pariwisata dan interaksi ekonomi pasar. Fakta yang berlawanan arah ini menunjukkan adanya ketegangan yang terus berlangsung antara arus besar kebijakan pembangunan nasional dan upaya masyarakat adat mempertahankan otonomi kulturalnya.

Fenomena Baduy menarik untuk dikaji secara kritis karena menghadirkan sebuah anomali terhadap asumsi dasar teori modernisasi, yaitu sebuah komunitas yang justru mempertahankan keberlanjutan sosial ekologisnya dengan cara menolak, bukan mengikuti, sebagian besar agenda modernisasi. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk menguji relevansi berbagai teori pembangunan, mulai dari modernisasi, ketergantungan, sistem dunia, hingga pembangunan

alternatif, dalam menjelaskan realitas empiris tersebut, sekaligus mengkaji relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat adat dalam konteks kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengapa paradigma modernisasi kurang relevan dalam membaca dinamika pembangunan masyarakat adat Baduy, mengkaji relevansi teori pembangunan alternatif sebagai kerangka penjelas yang lebih tepat, serta menelaah relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat adat Baduy dalam konteks kebijakan pembangunan di Kabupaten Lebak. Analisis ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pembangunan dan keberlanjutan kearifan lokal, sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan capaian fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga otonomi dan identitas budaya masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian studi pustaka atau studi kasus, yang dianggap paling sesuai untuk memahami fenomena pembangunan pada masyarakat adat Baduy secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu menempatkan fenomena pembangunan sebagai hasil dari relasi sosial, institusi, dan kekuasaan antara negara dan masyarakat adat. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penelusuran data dalam konteksnya yang alami, termasuk melalui kajian atas literatur dan dokumen ilmiah yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder, yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah terakreditasi, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu mengenai masyarakat adat Baduy dan teori pembangunan. Beberapa rujukan utama yang digunakan antara lain penelitian Suparmini, Setyawati, dan Sumunar (2013) mengenai pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal Baduy, Jasmine, Saharuddin, Murdianto, dan Abdulkadir (2023) mengenai pengaruh perilaku adat terhadap pengelolaan sumber daya alam, serta Aprianti, Indriyanti, Lestari, dan Fatihah (2024) mengenai perubahan sosial pada masyarakat Baduy Luar akibat modernisasi.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pada tahap reduksi, temuan dari berbagai sumber literatur dipilah dan disesuaikan dengan fokus kajian, yaitu keberlanjutan kearifan lokal Baduy dan relevansi masing-masing teori pembangunan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif analitis yang membandingkan proposisi setiap teori dengan temuan empiris mengenai Baduy. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara temuan literatur dan kerangka teoretis yang digunakan, sehingga penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai daya jelas masing-masing teori pembangunan terhadap fenomena Baduy.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber literatur, ditemukan bahwa masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, memiliki sistem pengelolaan wilayah yang terstruktur dan telah bertahan lintas generasi. Suparmini, Setyawati, dan Sumunar (2013) menjelaskan bahwa masyarakat Baduy membagi wilayahnya ke dalam tiga zona, yaitu zona reuma sebagai kawasan permukiman, zona heuma sebagai lahan

garapan, dan zona leuweung kolot sebagai hutan tua yang dilindungi secara ketat. Sistem zonasi ini terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologi sekaligus keberlanjutan ekonomi masyarakat tanpa bergantung pada intervensi teknologi maupun infrastruktur modern.

Temuan Jasmine, Saharuddin, Murdianto, dan Abdulkadir (2023) menunjukkan bahwa perilaku adat masyarakat Baduy terhadap kearifan lokalnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Semakin kuat kepatuhan masyarakat terhadap pikukuh, semakin konsisten pula praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dijalankan. Temuan ini menegaskan bahwa institusi adat berfungsi sebagai mekanisme pembangunan lokal yang efektif, sekalipun tidak mengikuti indikator pembangunan konvensional seperti pertumbuhan pendapatan atau pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, penelusuran terhadap penelitian Aprianti, Indriyanti, Lestari, dan Fatihah (2024) menemukan bahwa kelompok Baduy Luar, yang relasinya dengan dunia luar lebih terbuka dibandingkan Baduy Dalam, mulai mengalami perubahan sosial yang cukup nyata. Perubahan tersebut antara lain terlihat dari meningkatnya interaksi ekonomi pasar, bergesernya sebagian pola mata pencaharian ke sektor jasa dan pariwisata, serta terbukanya sebagian masyarakat terhadap unsur-unsur budaya baru. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak serta merta menghilangkan identitas budaya Baduy, karena inti nilai adat tetap dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok Baduy Dalam.

Secara keseluruhan, terdapat tiga temuan utama dalam kajian ini. Pertama, sistem zonasi dan pikukuh adat Baduy terbukti mampu menghasilkan keberlanjutan ekologis dan ekonomi tanpa mengikuti jalur modernisasi konvensional. Kedua, kepatuhan terhadap kearifan lokal berkorelasi signifikan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat Baduy. Ketiga, tekanan modernisasi yang berasal dari pembangunan wilayah di sekitar Baduy mulai memengaruhi dinamika sosial kelompok Baduy Luar, meskipun belum menghilangkan identitas budaya inti masyarakat adat tersebut.

Pembahasan

Kegagalan Paradigma Modernisasi dalam Membaca Masyarakat Adat Baduy

Jika dibaca melalui lensa teori modernisasi, masyarakat Baduy secara sepintas dapat dianggap sebagai contoh masyarakat tertinggal yang belum bertransformasi menuju tahapan masyarakat modern sebagaimana digambarkan Rostow (1960). Penolakan mereka terhadap listrik, kendaraan bermotor, dan pendidikan formal dapat ditafsirkan, dalam kerangka modernisasi, sebagai hambatan nilai tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pembacaan semacam ini justru memperlihatkan kelemahan mendasar teori modernisasi itu sendiri. Asumsi linearitas pembangunan gagal menjelaskan mengapa sistem zonasi adat Baduy justru menghasilkan keseimbangan ekologis dan ketahanan ekonomi yang telah terbukti bertahan lintas generasi (Suparmini, Setyawati, & Sumunar, 2013). Selain itu, teori modernisasi memperlakukan nilai tradisional sebagai sesuatu yang homogen dan statis, padahal pikukuh Baduy merupakan sistem norma yang dinamis dan tetap mampu beradaptasi dengan tekanan eksternal tanpa kehilangan intinya. Indikator kemajuan yang digunakan modernisasi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan konsumsi material, juga tidak sepenuhnya relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan pada masyarakat yang secara sadar memilih kesederhanaan ekonomi sebagai strategi keberlanjutan.

Ketergantungan dan Sistem Dunia: Posisi Baduy dalam Relasi Kekuasaan Negara dan Pasar

Teori ketergantungan dan sistem dunia memberikan kontribusi penting dengan menempatkan Baduy bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari struktur relasi kekuasaan yang lebih luas antara negara, pasar, dan masyarakat adat. Wilayah

Kabupaten Lebak, tempat masyarakat Baduy bermukim, mengalami tekanan pembangunan regional berupa perluasan infrastruktur jalan, sektor pariwisata, dan aktivitas ekonomi pasar di sekitarnya. Fenomena ini menempatkan kelompok Baduy Luar, yang relasinya dengan dunia luar lebih terbuka dibandingkan Baduy Dalam, pada posisi rentan terhadap komodifikasi budaya dan tekanan modernisasi tidak langsung. Penelitian Aprianti dkk. (2024) mengonfirmasi mulai terjadinya perubahan sosial pada masyarakat Baduy Luar sebagai konsekuensi dari paparan modernisasi tersebut. Dalam kerangka Frank (1967) dan Wallerstein (1974), fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk penetrasi logika pusat, yaitu kota, pasar, dan negara, terhadap wilayah pinggiran yang bercorak adat dan subsisten, yang berpotensi mengikis basis material dan kultural keberlanjutan Baduy dalam jangka panjang. Meski demikian, kerangka ini memiliki keterbatasan karena cenderung memosisikan Baduy sebagai objek pasif dari tekanan struktural, tanpa cukup memberi ruang pada kapasitas mereka untuk menyeleksi, menegosiasikan, atau bahkan menolak elemen elemen modernisasi tertentu secara aktif dan sadar.

Kearifan Lokal Baduy dalam Perspektif Teori Pembangunan Alternatif

Dibandingkan dua kerangka sebelumnya, teori pembangunan alternatif menawarkan daya jelas yang lebih kuat terhadap resiliensi Baduy. Sistem pikukuh yang mengatur pembagian wilayah, pola perladangan, serta larangan eksploitasi hutan tua, dapat dipahami sebagai institusi lokal yang menjalankan fungsi pembangunan berkelanjutan tanpa bergantung pada intervensi negara maupun modal eksternal, sejalan dengan gagasan pembangunan mandiri yang diusulkan Korten (1990). Temuan Jasmine dkk. (2023) yang menunjukkan pengaruh signifikan perilaku adat terhadap pola pengelolaan sumber daya alam Baduy memperkuat argumen bahwa keberhasilan pembangunan di sana bertumpu pada kapasitas kelembagaan lokal, bukan pada penerapan model pembangunan dari luar. Hal ini sejalan dengan penekanan Chambers (1997) bahwa realitas dan pengetahuan masyarakat lokal semestinya menjadi titik tolak, bukan objek koreksi, dalam perencanaan pembangunan. Lebih jauh, otonomi Baduy dalam menolak sebagian modernisasi dan secara aktif mempertahankan pikukuh dapat dibaca sebagai bentuk pemberdayaan sebagaimana dikonseptualisasikan Friedmann (1992), yaitu penguasaan masyarakat atas basis kekuasaan sosial dan kulturalnya sendiri, bukan sekadar tunduk pada arah pembangunan yang didikte pihak luar.

Negara, Kekuasaan, dan Ambivalensi Kebijakan Pembangunan Daerah

Posisi negara terhadap Baduy bersifat ambivalen. Di satu sisi, negara memberikan bentuk pengakuan dan perlindungan tertentu terhadap otonomi wilayah adat Kanekes, termasuk penghormatan terhadap larangan pembangunan infrastruktur modern di kawasan inti. Di sisi lain, negara dan pemerintah daerah tetap menjalankan agenda pembangunan di wilayah sekitar Baduy, seperti jalan, fasilitas pariwisata, dan promosi ekowisata, yang pada praktiknya menghasilkan tekanan modernisasi tidak langsung, sebagaimana tampak dari perubahan sosial pada Baduy Luar (Aprianti dkk., 2024). Ambivalensi ini mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak sepenuhnya represif, tetapi juga tidak sepenuhnya emansipatif, karena negara menempatkan diri sebagai pelindung sekaligus pendorong pembangunan yang berpotensi mengikis basis kearifan lokal yang justru hendak dilindunginya. Dampak sosial dari ambivalensi ini terlihat pada meningkatnya interaksi ekonomi pasar sebagian warga Baduy Luar, pergeseran pola mata pencaharian menuju sektor jasa dan pariwisata, serta potensi komodifikasi identitas adat sebagai daya tarik wisata. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai siapa yang berhak mendefinisikan makna pembangunan, apakah negara melalui kebijakan pertumbuhan wilayah, atau masyarakat adat melalui pikukuh mereka sendiri, menjadi inti dari relasi kekuasaan yang perlu terus dikaji secara kritis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa paradigma modernisasi tidak sepenuhnya relevan untuk menjelaskan dinamika pembangunan masyarakat adat Baduy, karena asumsi linearitas dan homogenitas nilai tradisionalnya gagal menangkap keberhasilan sistem zonasi dan pikukuh adat dalam menciptakan keberlanjutan sosial ekologis. Teori pembangunan alternatif, dengan penekanan pada pembangunan berpusat pada manusia, partisipatif, dan berbasis institusi lokal, terbukti memiliki daya jelas yang lebih kuat dibandingkan modernisasi maupun ketergantungan dan sistem dunia dalam memahami resiliensi kearifan lokal Baduy, meskipun kedua kerangka terakhir tetap relevan untuk memetakan posisi struktural Baduy dalam relasi kekuasaan yang lebih luas.

Relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat adat Baduy juga terbukti bersifat ambivalen. Pengakuan dan perlindungan otonomi wilayah inti berjalan beriringan dengan tekanan modernisasi tidak langsung melalui pembangunan kawasan sekitarnya, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika sosial kelompok Baduy Luar. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan capaian fisik semata, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keberlanjutan sosial, kelembagaan adat, dan otonomi budaya masyarakat lokal.

Saran

Terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak. Pertama, bagi pemerintah daerah Kabupaten Lebak, kebijakan pembangunan di wilayah penyangga Baduy sebaiknya dirancang secara partisipatif dengan melibatkan lembaga adat, yaitu kapuunan, dalam setiap perencanaan pembangunan, sehingga otonomi kultural masyarakat adat tetap terjaga di tengah pesatnya pembangunan regional. Kedua, pengembangan ekowisata di sekitar wilayah Baduy sebaiknya didasarkan pada kesepakatan adat dan prinsip pembangunan alternatif, agar tidak menimbulkan komodifikasi budaya maupun ketergantungan ekonomi yang mengikis otonomi kultural masyarakat. Ketiga, bagi kalangan akademisi dan peneliti di masa mendatang, diperlukan penelitian lanjutan yang secara khusus memetakan mekanisme adaptasi kelompok Baduy Luar terhadap tekanan modernisasi, sebagai basis perumusan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap dinamika internal masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, S., Indriyanti, A. P., Lestari, P. N., & Fatihah, M. N. (2024). Perubahan sosial masyarakat suku Baduy Luar sebagai akibat modernisasi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1134-1145.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and underdevelopment in Latin America: Historical studies of Chile and Brazil*. Monthly Review Press.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell Publishers.
- Jasmine, L. F., Saharuddin, Murdianto, & Abdulkadir, M. (2023). Perilaku masyarakat adat terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (Kasus: Masyarakat adat

- Baduy). Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 7(2), 249-265. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i2.951>
- Korten, D. C. (1990). *Getting to the 21st century: Voluntary action and the global agenda*. Kumarian Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non communist manifesto*. Cambridge University Press.
- Sumarlina, E. S. N., Permana, R. S. M., & Darsa, U. A. (2023). Implementasi komunikasi politik berbasis kearifan lokal masyarakat adat Baduy. *Kabuyutan: Jurnal Kajian Ilmu Sosial dan Humaniora Berbasis Kearifan Lokal*, 2(1).
- Suparmini, Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), 8-22.
- Wallerstein, I. (1974). *The modern world system: Capitalist agriculture and the origins of the European world economy in the sixteenth century*. Academic Press.